

musyawarah, meminta sumbangan dengan paksaan, dalam bertindak ada unsur kepentingan pribadi. Sikap kepemimpinan demikian dimiliki oleh pemimpin yang otokratis, yaitu pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap para pengikutnya sebagai alat semata-mata dan tidak boleh membantah perintah, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, tergantung kepada kekuasaan formalnya, bermusyawarah hanya untuk menyampaikan instruksi atau perintah, serta dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum atau bertindak sebagai diktator.¹⁴

Perihal wewenang (otoritas) pemimpin dalam teori Max Weber, Mudjiono memiliki wewenang legal-rasional. Ini terbukti dengan dirinya sebagai ketua RT yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Melian melalui musyawarah dan tentu memiliki otoritas tertinggi dari hukum masyarakat. Mudjiono memiliki hak untuk memberikan perintah, membuat peraturan dan menjalankannya berdasar pada konstitusi yang ditafsirkan secara resmi. Menurut teori Max Weber, dalam wewenang legal-rasional perintah-perintah yang diberikan berdasarkan norma-norma yang impersonal (tidak bersifat pribadi). Pemegang kekuasaan dalam memberi perintah tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai hak pribadinya, melainkan sebagai suatu institusi impersonal. Institusi ini

¹⁴ Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 19.

